

IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K) DI KABUPATEN TANAH DATAR OLEH DINAS PERTANIAN

Indah Fadhilah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

fadhilahi727@gmail.com

*Corresponding author

Rizki Syafril

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

rizkisyafri@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknis analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar sudah terlaksana dimana implementasi program ini telah memberikan manfaat berupa perlindungan finansial bagi peternak yang mengalami kerugian akibat kematian atau kehilangan ternak. Namun, implementasinya masih memerlukan upaya lebih lanjut agar dapat menjangkau lebih banyak peternak secara merata. Program AUTS/K ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan juga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimana anggaran premi 80% dibayarkan oleh Pemerintah pusat kepada Pihak Asuransi dan 20% di tanggung oleh APBD Kabupaten Tanah Datar semenjak tahun 2022. Oleh sebab itu para peternak yang mengikuti program ini mereka tidak lagi membayar premi kepada pihak Asuransi, disini pihak asuransi yang ditunjuk yaitu PT.Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) yang juga ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan program AUTS/K. Selanjutnya dalam pelaksanaan program ini juga menghadapi beberapa tantangan signifikan, terutama dalam aspek sosial dan budaya, seperti persepsi negatif peternak terhadap pemasangan eartag yang dianggap menurunkan nilai jual sapi. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dan jarak antar kandang yang jauh mengakibatkan ketidakefisienan dalam survei dan monitoring

Kata Kunci : Implementasi, Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Abstract

This research aims to explain how the Cattle/Buffalo Livestock Business Insurance Program (AUTS/K) is implemented in Tanah Datar Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive method with technical data analysis in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions by selecting informants using purposive sampling techniques. The results of the research show that the implementation of the Cattle/Buffalo Livestock Business Insurance Program (AUTS/K) in Tanah Datar Regency has been implemented where the implementation of this program has provided benefits in the form of financial protection for farmers who experience losses due to death or loss of livestock. However, its implementation still requires further efforts to reach more breeders evenly. The AUTS/K program is a collaboration between the Ministry of Agriculture and the Tanah Datar

Regency Government where 80% of the premium budget is given by the central government to Insurance Companies and 20% is covered by the Tanah Datar Regency APBD starting in 2022. Therefore, breeders who take part in the program no longer pay premiums to insurance companies, here the insurance company appointed is PT. Indonesian Insurance Services (Jasindo) which is also responsible for implementing the AUTS/K program. Furthermore, the implementation of this program also faces several significant challenges, especially in social and cultural aspects, such as the negative perception of breeders regarding the installation of ear tags which are considered to reduce the selling value of cattle. In addition, difficult geographical conditions and long distances between cages result in inefficiencies in supervision and monitoring

Keywords: *Implementation, Cattle/Buffalo Business Insurance Program*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi dengan peran signifikan terhadap pertumbuhan negara. Salah satu sektor yang memegang peran penting adalah pertanian, khususnya peternakan sapi dan kerbau, yang memberikan kontribusi besar dalam penyediaan pangan, lapangan kerja, dan pendapatan bagi jutaan petani serta peternak. Namun, sektor ini menghadapi sejumlah risiko, seperti penyakit hewan, bencana alam, dan fluktuasi harga pakan, yang dapat mengancam keberlangsungan usaha ternak.

Asuransi menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu mengelola risiko tersebut. Menurut Julius R. Latumaerissa (2011:447), asuransi adalah perjanjian di mana pihak bertanggung membayar premi kepada pihak penanggung untuk mendapatkan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai upaya mendukung sektor peternakan, pada tahun 2021 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dengan memberikan bantuan premi asuransi. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai pelaksana.

Kabupaten Tanah Datar, dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan peternak, termasuk salah satu dari lima kabupaten di Sumatera Barat dengan populasi sapi/kerbau terbanyak berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan program AUTS/K sejak 2017, yang diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Datar No. 18 Tahun 2022. Peraturan ini menetapkan ganti rugi sebesar Rp10.000.000 per ekor per tahun untuk klaim akibat kematian ternak, dengan premi sebesar Rp40.000 per ekor per

tahun yang kini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD. Meskipun menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Tanah Datar pada 2022, implementasi AUTS/K menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan adalah resistensi peternak terhadap pemasangan eartag pada ternak, karena dianggap menurunkan nilai jual sapi. Selain itu, proses pendaftaran sapi melalui aplikasi SIAP sering terkendala masalah teknis, seperti kesalahan pada foto sapi yang diunggah, sehingga memperlambat pendaftaran. Perbedaan pemahaman antara petugas lapangan, petugas asuransi, dan staf Dinas Pertanian terkait persyaratan dokumentasi juga turut menghambat kelancaran program. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, komunikasi, dan pelatihan bagi semua pihak terkait agar program AUTS/K dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi peternak di Tanah Datar.

STUDI LITERATUR

Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, implementasi adalah pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan kerjasama antara berbagai aktor untuk mencapai hasil yang diinginkan (Aydini & Syafril, 2024). Menurut Syaukani (Mamonto et al., 2018), implementasi adalah serangkaian aktivitas yang menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar dapat menghasilkan dampak yang diharapkan.

Penelitian terkait implementasi kebijakan Asuransi Usaha Ternak menunjukkan berbagai temuan penting. Penelitian Rahmat Fadhil et al. (2021) menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) untuk merancang strategi penyebaran informasi tentang asuransi ternak di Aceh, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh agama, dan media guna meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Penelitian oleh M. Hajir Susanto et al. (2021) menyoroti pentingnya sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), sesuai aturan hukum yang berlaku.

Penelitian Irma Fauziah et al. (2022) menilai kesediaan peternak membayar premi AUTS di Wonogiri, di mana faktor-faktor seperti usia, pendidikan, pendapatan, dan risiko bencana memengaruhi keputusan peternak. Pemerintah disarankan untuk lebih

fokus pada peternak muda yang berpendidikan tinggi. Sementara itu, penelitian Agus Subhan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa implementasi dan respon peternak terhadap AUTS di Getasan telah berjalan sesuai aturan sejak 2016. Penelitian Dzikri Syarul Anam (2022) mengevaluasi pelaksanaan program AUTS/K di Lamongan dan Tuban. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua aspek keberhasilan program telah terpenuhi, dari tahap sosialisasi, pendataan, hingga penilaian risiko, mencerminkan pencapaian tujuan yang direncanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Deden Mulyana dalam (Elviyana et al, 2024) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal tertentu yang ada dalam kehidupan nyata (alamiah) dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Selanjutnya fokus penelitian ini yaitu Implementasi program asuransi usaha ternak sapi/kerbau di kabupaten Tanah Datar oleh Dinas Pertanian. Penelitian ini dilakukan pada di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, PT. Jasindo Padang, Petugas Teknis Lapangan, Kelompok Peternak, dan Masyarakat, pemilihan informan tersebut menggunakan teknik purposive sampling dimana pemilihan dilakukan atas dasar keahlian atau pengetahuan yang relevan dengan objek penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami situasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan dari Smith (1973) dimana terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut yang meliputi : Idealized Policy (Kebijakan yang diideal), Target Group (Kelompok Sasaran), Implementing Organization (Badan Pelaksana), dan Enviromental Factor (Faktor Ekternal).

PEMBAHASAN

Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Di Kabupaten Tanah Oleh Dinas Pertanian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang Implementasi program asuransi usaha ternak sapi/kerbau di Kabupaten Tanah Datar, sehingga peneliti berusaha untuk mengungkapkan lalu mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data data yang diperoleh dari observasi wawancara dan juga dokumentasi.

Implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan yang telah buat oleh badan atau seorangan yang telah diberi wewenang oleh negara. Implementasi adalah upaya dari pelaksanaan keputusan kebijakan. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Tanah Datar adalah penerapan program yang memberikan perlindungan finansial kepada para peternak dari resiko kerugian ternak yang mereka alami yang diakibatkan oleh penyakit, kehilangan, maupun bencana alam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar No 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Asuransi yang bertujuan terjaminnya keberlanjutan kegiatan usaha perekonomian para ternak. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Empat variable tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variable dalam implementasi kebijakan public tersebut menurut Smith (1973) yaitu:

1. Idealized Policy (Kebijakan yang diideal)

Menurut Smith (1973) Idealized Policy yaitu pola pola interaksi yang ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan yang merujuk pada bentuk ideal atau gambaran dari kebijakan itu sendiri. Dalam konteks program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2022 tentang pedoman bantuan premi asuransi untuk mendukung Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Dimana program usaha ternak sapi/kerbau di Tanah Datar pada tahun 2022 menjadi salah satu program unggulan yang diangkat oleh Bupati Tanah Datar. Sehingga pembayaran premi yang seharusnya di bayarkan oleh para peternak ke PT.Asuransi Jasa Indonesia sebanyak Rp 40.000/ekor pertahun sekarang dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan anggran APBD Tanah datar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibuk Rinda Dani Kurnia selaku staf Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

“...dinas kabupaten tanah datar membayarkan premi asuransi ke pihak jasindo sebanyak Rp 40.000/ekor/tahun sehingga para peternak yang telah mendaftarkan sapiunya untuk diasuransikan tidak membayar premi lagi alias gratis. Ini dilakukan sejak tahun 2022 yang diangkat menjadi program unggulan”(Wawancara 13 November 2024).

Pendapat Ibuk Rinda Dani Kurnia tentang premi diatas, hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Raspairil selaku ketua kelompok ternak di kecamatan lima kaum. Menurut Raspairil kelompok ternak di kabupaten tanah datar tidak membayar premi karena telah dibayarkan oleh dinas pertanian dan ini berlaku hanya 1 tahun, agar kelompok tersebut dibayarkan premi asuransi di tahun berikutnya, kelompok ternak tersebut harus mendaftarkan lagi ternaknya. Berikut pernyataannya:

“...kami yang sudah mendaftar ini tidak lagi membayar premi pakai uang pribadi kami sendiri, karena dinas sudah membayarkan. Tetapi dibayarkan oleh dinas ini hanya dalam jangka waktu satu tahun. Untuk tahun selanjutnya kami mengulang daftar lagi agar preminya gratis lagi.” (Wawancara 18 Oktober 2024)

Sebagaimana yang disampaikan selanjutnya oleh Bapak Eri selaku Kepala Jorong Guguak ateh juga menyampaikan bahwa mengenai program AUTS/K ini :

“..untuk Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini sepengetahuan saya yaitu program asuransi yang memiliki jangka waktu selama satu tahun dimana sapi yang diasuransikan adalah induk sapi atau sapi betina. Dimana sapi ini diasuransikan sesuai dengan ukura besarnya. Jika masa asuransinya sudah habis maka diulang kembali untuk pendafatrannya ke Dinas Pertanian. Selanjutnya apabila dimasa dalam setahun tersebut ternak kita mati sesuai dengan ketentuan yang dipedomani maka kita akan mendapatkan ganti rugi sehingga kita tidak rugi. Tapi kalau tidak dimasukan kedalam asurani apabila mati ternak itu bisa rugi sekali.” (Wawancara, 21 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa upaya pemerintah daerah Tanah Datar untuk menintegrasikan program asuransi usaha ternak sapi/Kerbau (AUTS/K) sebagai program unggulan yang didukung penuh oleh kebijakan daerah dan nasional. Kebijakan ini diwujudkan melalui pembebasan pembayaran premi sebesar Rp 40.000/ekor/tahun bagi peternak, yang sepenuhnya ditanggung oleh APBD Tanah Datar. Implementasi ini selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta peraturan bupati tentang program unggulan, di mana kebijakan

tersebut disesuaikan dengan kesediaan anggaran daerah. Program ini juga mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai bentuk kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, dengan skema pembayaran premi 80% oleh Kementerian dan 20% oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan wewenang kepada dinas pertanian untuk mengelola dan melaksanakan program asuransi. Dalam hal ini telah mencerminkan implementasi dari idealized policy menurut teori Smith dengan fokus pada cita-cita perlindungan peternak, implementasi yang terstruktur, dan indikator keberhasilan yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan pembiayaan premi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi ternak. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Mulyani selaku kepala Dinas Pertanian Kabuapten Tanah Datar bahwa yaitu indikator output dari Program AUTS/K (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau) adalah jumlah kuota yang tersedia untuk program ini, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai bagian dari program unggulan daerah. Target dari program ini diukur berdasarkan jumlah unit atau ekor ternak yang menjadi objek asuransi. Jumlah tersebut disesuaikan dengan alokasi dana untuk pembayaran premi, di mana pemerintah daerah menanggung 20% dari total premi yang ditargetkan setiap tahunnya. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada populasi ternak di Kabupaten Tanah Datar dari berbagai risiko, termasuk ancaman kematian akibat serangan penyakit atau kecelakaan

2. Target Group (Kelompok Sasaran)

Dalam teori Smit mengenai kelompok sasaran (target group) dalam sebuah kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kelompok sasaran memahami, menerima, dan mampu mengakses kebijakan tersebut. Selanjutnya target groups juga diartikan bagian dari policy stakeholder's yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan (Siregar, 2022) Dalam konteks pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar, kelompok sasaran utama adalah para peternak sapi yang tergabung dalam kelompok

ternak. Namun, hasil wawancara dan data penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala signifikan yang mempengaruhi efektivitas program ini.

Pertama, tingkat pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah, sebagaimana disampaikan oleh beberapa peternak yang baru mengetahui keberadaan program ini setelah beberapa tahun berjalan. Kedua, persyaratan keikutsertaan seperti harus tergabung dalam kelompok ternak menjadi tantangan di wilayah dengan karakteristik masyarakat yang cenderung individualis. Menurut Smit, kebijakan yang baik harus mampu menjangkau dan melibatkan kelompok sasaran melalui sosialisasi yang efektif dan adaptasi terhadap kondisi sosial setempat. Dalam hal ini, minimnya informasi yang merata dan hambatan dalam pembentukan kelompok ternak menunjukkan perlunya memperbaiki strategi komunikasi dan pelaksanaan kebijakan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, variasi tingkat kepuasan terhadap jumlah dana klaim mencerminkan perlunya evaluasi terhadap bantuan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil peternak untuk memastikan keberlanjutan

3. Impelementing Organization (Badan Pelaksana)

Organisasi pelaksana, sebagaimana didefinisikan oleh Smith (1973), adalah entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam konteks pemerintahan, organisasi atau individu pelaksana ini menjalankan tugas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. , sebagaimana ditegaskan oleh Putra (2020). Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dimana organisasi pelaksana program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dan PT Jasindo, telah melaksanakan tugas mereka dengan berbagai upaya yang cukup signifikan. Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab program utama ini secara rutin melakukan sosialisasi kepada peternak di setiap nagari melalui petugas teknis lapangan. Mereka memberikan edukasi mengenai pembentukan kelompok ternak sebagai syarat utama untuk mendaftar dalam program AUTS/K. Selain itu, Dinas Pertanian juga berperan dalam memfasilitasi proses asuransi klaim dengan memastikan verifikasi lapangan atas laporan kerugian yang diberikan oleh peternak. Langkah ini dilakukan secara

sistematis, termasuk melalui aplikasi SIAP yang digunakan untuk melaporkan kejadian.

Di sisi lain, PT Jasindo, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN, menjalankan fungsi asuransi dengan baik, seperti menjamin transfer dana klaim langsung ke rekening peternak yang berhak. Namun, meskipun telah ada upaya sosialisasi yang rutin, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang memadai tentang program ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan sosialisasi yang perlu diperbaiki agar lebih optimal dan merata. Selain itu, beberapa peternak mengungkapkan bahwa dana klaim yang diberikan masih dirasa kurang mencukupi untuk melanjutkan usaha mereka, meskipun manfaat program tetap diakui. Dengan demikian, organisasi pelaksana telah menunjukkan dedikasinya dalam menjalankan tugas mereka, namun efektivitas program ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan penyebaran informasi, evaluasi besaran klaim, dan pendekatan yang lebih proaktif

4. Enviromental Factor (Faktor Ekternal)

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) di kabupaten Tanah Datar ditemukan bahwa resistensi sosial dan budaya menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan ini. Beberapa peternak menolak pemasangan eartag pada ternak mereka karena adanya persepsi bahwa penandaan tersebut dapat menurunkan nilai jual sapi. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa eartag yang terkait dengan nomor seri asuransi menunjukkan pengawasan ketat dari pihak dinas, yang dianggap dapat mengurangi kepercayaan pembeli potensial. Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan asumsi bahwa pembeli berikutnya mungkin menghadapi masalah administratif atau klaim fiktif.

Selain itu, faktor lingkungan geografis juga memengaruhi pelaksanaan program. Kondisi medan yang sulit dengan jarak antar kandang yang jauh menghambat efisiensi proses survei dan monitoring ternak. Waktu yang banyak tersita untuk perjalanan mengurangi kesempatan untuk memberikan edukasi yang memadai kepada peternak. Akibatnya, tingkat partisipasi peternak dalam program ini menjadi rendah karena pemahaman mereka terhadap manfaat dan prosedur program kurang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan data lapangan yang telah dipaparkan mengenai Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar oleh Dinas Pertanian, dapat disimpulkan bahwa program ini telah dilaksanakan dengan memberikan manfaat berupa perlindungan finansial bagi peternak yang mengalami kerugian akibat kematian atau kehilangan ternak sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian yang juga menjadi landasan dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Tanah Datar. Namun, implementasinya masih memerlukan upaya lebih lanjut agar dapat menjangkau lebih banyak peternak secara merata diseluruh daerah kabupaten Tanah Datar.

Adapun dalam pelaksanaan program ini juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu dalam aspek sosial dan budaya, seperti persepsi negatif peternak terhadap pemasangan eartag yang dianggap menurunkan nilai jual sapi. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dan jarak antar kandang yang jauh mengakibatkan ketidakefisienan dalam survei dan monitoring. Hambatan-hambatan tersebut perlu disiasati dengan cara kearifan lokal juga, seperti pemaparan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut sehingga adanya pemberian pemahaman yang tepat dan pendekatan yang sesuai maka persepsi negative yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ini bisa teratasi.

REFERENSI

- Aydini, R., & Syafril, R. (2024). Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* , 12 (1), 137-146.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* , 1 (1), 1-11.
- Charlly, C., Arsih dkk (2021) Proses Adposi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabuapten Pesisir Selatan . Vol 14(2)

- Eviyana, K., Rinanta, AD, & Syafril, R. (2024). Inovasi LPP RRI dalam Memberikan Informasi Melalui Aplikasi RRI Digital (Studi Pada LPP RRI Padang). *Jurnal Inovasi Penelitian dan Publikasi* , 2 (3), 1807-1813.
- Fadhil, R., Hanum, Z., & Yunus, M. (2021). Sistem Pengembangan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(4), 569-581.
- Hariyati, A. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Insani, R. B., Darmawan, A., & Hartonbo, S. (2022, August). Implementasi Kebijakan Diskon Pasang Baru Di Pdam Surya Sembada Kota Surabaya (Indikator Sumber Daya). In Seminar Nasional Hasil Skripsi (Vol. 1, No. 01, pp. 361-365).
- M.Hajir Susanto ,. dkk (2021) Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjauan Hukum Asuransi . Vol 1(2)
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif* , 1 (1).
- Muhammad, Amar ., (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Asuransi Usaha Ternak sapi dan Kerbau di Kelurahan Sangisari.Vol 18 (1)
- Prasetyo, A. S. (2022). Respon peternak terhadap program asuransi usaha ternak sapi (AUTS) di Kecamatan Getasan. *Jurnal Agrica*, 15(2), 89-100.
- Reno Affrian (2023). Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan , Yogyakarta, CV Bintang Semesta Media
- Ramdhani, Abdullah, dkk. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol 11 No 01. Hal 1-12.
- Sugiyono (2022). Metode Penelitian Administrasi dan Metode R&D. Bandung: alfabeta

- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713-722.
- Sutojo. (2015). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka
- Tahir, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan Dan Pengawasan Alsintan Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 115-136.
- Triani, M., & Lubis, T. (2021). Pengaruh Minat Peternak Terhadap Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) pada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(4), 28-